

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
(Studi di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)**

Oleh :

NINGSIH AMELIA WARNI PUTRI
NIM : 2032019055

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara (HTN)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023**

SKRIPSI

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)

Diajukan Oleh:

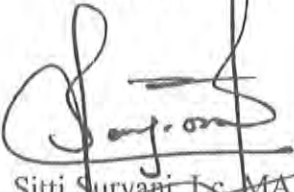
NINGSIH AMELIA WARNI PUTRI

NIM: 2032019055

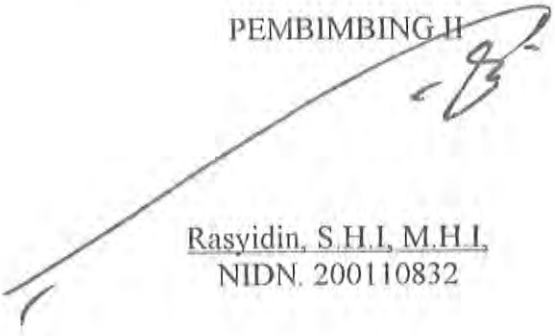
**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HTN/Hukum Tata Negara
Fakultas: Syariah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 197308212011012001

PEMBIMBING II


Rasyidin, S.H.I, M.H.I.
NIDN. 200110832

PENGESAHAN SKRIPSI

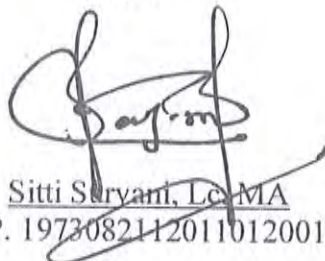
Skripsi Berjudul KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada 04 Agustus 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 04 Agustus 2023

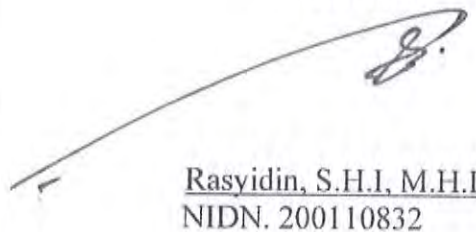
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua



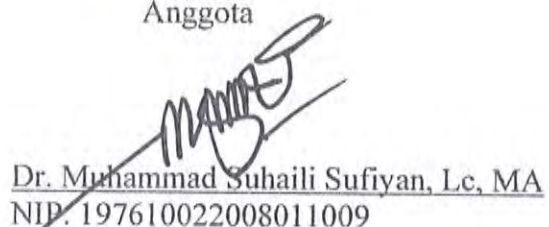
Sitti Suryani, Lc, MA
NIP. 1973082112011012001

Sekretaris



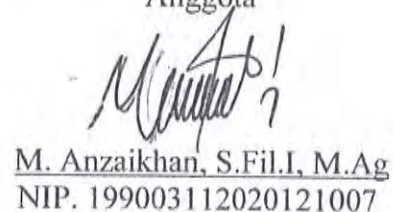
Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 200110832

Anggota



Dr. Muhammad Suhaili Sufiyan, Lc, MA
NIP. 197610022008011009

Anggota



M. Anzaikhan, S.Fil.I, M.Ag
NIP. 199003112020121007

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ningsih Amelia Warni Putri

NIM : 2032019055

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Desa Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Ningsih Amelia Warni Putri

ABSTRAK

Di beberapa gampong di Kecamatan Langsa Baro, kepemimpinan serta peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, juga untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa perspektif Fikih Siyasah. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan perempuan di Kecamatan Langsa Baro terbatas dengan jabatan yang diemban, karena belum ada perempuan yang menjadi geuchik, namun upaya pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro dilakukan melalui ketua PKK. Pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di antaranya dengan memberikan bantuan menggunakan dana gampong agar masyarakat dapat menggunakan uang tersebut untuk berwirausaha. Selain itu dalam meningkatkan pembangunan masyarakat, pemerintahan desa memberikan sosialisasi kewirausahaan. Pembangunan masyarakat dalam aspek lainnya seperti perencanaan pembangunan dalam aspek nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik masyarakat, yaitu terciptanya suasana kegotongroyongan sosial dalam proses pembangunan masyarakat dapat terpenuhi.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Perempuan, Fikih Siyasah*

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan Istilah	9
G. Kerangka Teori	10
H. Kajian Terdahulu	11
I. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II LANDASAN TEORI	 15
A. Pemerintahan Desa, Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat	15
B. Kepemimpinan Perempuan	28
C. Peranan Perempuan dalam Pemerintahan Desa	36
D. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan Perempuan	41
 BAB III METODE PENELITIAN	 46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisis Data	48
E. Pengujian Keabsahan Data.....	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa	53
C. Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Kecamatan Langsa Baro Langsa Perspektif Fikih Siyash	56
D. Analisis Penulis	59
 BAB V PENUTUP	 61

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peranan di kehidupan sehari-hari perempuan memang belum bisa menggantikan pekerjaan laki-laki secara sepenuhnya, dan ini berakibat pada diskriminatif pada bias gender. Seringkali wanita hanya dipekerjakan sebagai ibu rumah tangga yang biasanya hanya mencuci, memasak, menjaga rumah dan anak yang pekerjaan tersebut tidak diberi upah. Ketimpangan hal semacam itu membuat wanita seolah-olah tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan dan mengakibatkan kemiskinan.

Pembangunan desa merupakan faktor penting bagi jalannya roda pemerintahan guna menjadikan wilayah desa menjadi kekuatan utama, karena desa adalah pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan. Dampak yang dirasakan akan maksimal jika pemerintah melakukan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan desa adalah motor utama penggerak roda perekonomian melalui sektor pertanian, jalan poros desa, jembatan, saluran irigasi atau tepatnya infrastruktur fisik. Bentuk upaya subsisten terhadap petani di desa merupakan upaya mempertahankan secara konservatif kelas petani yang miskin, tentu nanti akan berdampak pada implikasinya yang kemudian akan menciptakan adanya dua kelas petani yang berbeda yakni peasant maupun farmer, yaitu kelas farmer sendiri memiliki alat dan modal produksi yang sangat masif, sedangkan kelas peasant sendiri yaitu kelas petani yang

subsisten dengan mengandalkan faktor keringat dan kekuatan yang dimiliki. Dari sinilah kemudian tercipta sulitnya berkembang. Masyarakat desa seharusnya diberikan sebuah edukasi atau perhatian yang lebih, dengan begitu pembangunan infrastuktur yang memadai dapat dijadikan sebuah strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa, karena desa dan kota memiliki peran yang sama-sama penting dalam mengembangkan ekonomi suatu wilayah. Jika peran desa dan kota dapat berjalan dengan baik. Setiap aspirasi masyarakat akan melahirkan sebuah pembangunan yang maksimal, tetapi jika masyarakatnya pasif maka kekuasaan dari sebuah pemerintahan juga bisa berlaku sewenang-wenang.¹

Pembangunan pedesaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan agar terbentuk dan terciptanya masyarakat yang madani.² Pada prosesnya harus menitikberatkan pada keikutsertaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang berada di desa sebagai faktor penggerak. Kunci pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan optimal adalah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lokal yang ada di desa, sumber daya manusia juga harus termanfaatkan dengan baik, dengan tidak memandang bias gender sebagai pemisah antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan.³

Unsur pemberdayaan sesungguhnya harus memberi celah pada kaum wanita untuk tetap bisa berkarya dan berkreatifitas. Kaum wanita sekarang

¹ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 55.

² *Ibid*, h. 56.

³ Ahdia Indah, *Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*, Jurnal Academica, Vol 5, No 2, 2017.

sudah tidak bisa dipandang seperti wanita pada jaman dahulu karena pada perkembangannya, ternyata wanita juga bisa memberikan sumbangsih berupa ide, tenaga, dan waktu dalam menciptakan suatu inovasi yang dapat diterapkan di desa untuk pembangunan desa. Dapat dilihat di kota-kota besar, begitu diberdayakannya wanita dalam bidang industri maupun perkantoran mereka merupakan wanita pekerja yang produktif. Hal seperti itulah yang sebenarnya membuktikan bahwa saat ini wanita sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai kaum yang terpinggirkan. Untuk menciptakan kolaborasi maksimal dalam membangun desa yang lebih baik, maka kolaborasi antara berbagai elemen harus bisa diajak demi menyatukan satu visi dan misi tanpa mendikotomikan gender sebagai bias jurang yang memisahkan.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat. Dengan ini warga desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam partisipasi warga desa yaitu warga yang enggan terlibat dalam forum-forum yang ada di desa. Mereka merasa jenuh mengikuti forum tersebut karena usulan warga seringkali tidak terealisasi. Kendala lainnya adalah kehadiran perempuan dalam forum-forum perencanaan pembangunan di desa masih sangat minim.

Program pembangunan seharusnya menjadi alat, bukan menjadi tujuan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara, baik laki-laki

⁴ Sofiani, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*, Jurnal Muwazah, Vol 1, No 1, 2010.

maupun perempuan sehingga kesetaraan antara keduanya bisa terwujud. Pengabaian peran perempuan telah menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lemah, misalnya dalam bidang pendidikan ditambah dengan budaya yang tidak berpihak serta pemahaman tafsir agama yang cenderung bias gender sehingga semakin menjadikan perempuan tersudut dan memiliki posisi yang rentan. Peran perempuan dalam pembangunan desa seringkali diragukan karena dianggap tidak layak dan tidak mampu.⁵

Kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya mempengaruhi kaum laki-laki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok kecil atau besar yang bertujuan mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya.⁶ Peran domestik perempuan yang sifatnya kodrati seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan lain-lain, memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Akan tetapi, dalam peran publik, perempuan sebagai anggota masyarakat dan atau sebagai warga negara, mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, berpolitik, dan melakukan peran sosialnya yang lebih tegas dan transparan.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan

⁵ M. Todara dan S. Smit, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 19.

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 376.

tertindas. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang dilukiskan sebagai sakti (istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.

Perempuan saat ini memiliki beragam profesi di dalam masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam keluarga, perkantoran, politik maupun kepala daerah. Dalam fikih siyasah, peran perempuan cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik.⁷ Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam. Diantara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat karena semua manusia di muka bumi itu sama yaitu untuk beribadah. Islam memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Kehidupan dunia harus seapik mungkin sehingga manusia bisa mengabdikan kepada Allah secara lebih sempurna. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), h. 42.

diatas aturan-aturan din (agama). Dalam Fikih Siyasa sendiri bagian dari *siyasa dusturiyah* yaitu hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara atau masyarakat yang mempunyai hak-hak warga negara yang wajib dilindungi karena prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, jenis kelamin dan agama.⁸

Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Syariat memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan tertentu. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya. Pendapat ini didasarkan pada surat At Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 14.

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik, pemerintahan, mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum.

Di beberapa gampong di Kecamatan Langsa Baro, kepemimpinan serta peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.. Hanya permasalahannya yang ada di beberapa gampong di Kecamatan Langsa Baro yang meliputi Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Paya Bujok Seuleumak dan Gampong Geudubang Jawa kepemimpinan perempuan dalam organisasi PKK kurang potensial karena kurangnya dukungan dari masyarakat itu sendiri serta ide-ide yang sulit dikembangkan untuk pembangunan desa.⁹

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada 5 gampong di Kecamatan Langsa Baro. Adapun gampong tersebut adalah Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Paya Bujok Seuleumak dan Gampong Geudubang Jawa.

⁹ Observasi awal pada tanggal 23 Januari 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kepemimpinan perempuan di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa?
2. Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa perspektif Fikih Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa perspektif Fikih Siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan konsep praktik lapangan khususnya mengenai peran perempuan dalam pembangunan masyarakat desa.
2. Secara praktis:
 - a. Memberikan wawasan dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro.
 - b. Dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa.

F. Penjelasan Istilah

1. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan menurut Joewono kepemimpinan diartikan sebagai suatu cara dan metode seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut dengan sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendak-Nya.¹⁰ Kepemimpinan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kepemimpinan dalam pembangunan masyarakat desa. Sedangkan perempuan didefinisikan sebagai orang (manusia) yg mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹¹ Kepemimpinan perempuan yang dimaksud penulis di sini adalah kepemimpinan perempuan yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa khususnya dalam pembangunan masyarakat desa.

2. Fikih Siyasah

Kata Fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fikih adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fikih tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”¹²

¹⁰ Joewono, *Pokok - Pokok Kepemimpinan Abad 21*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), h. 3.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 262.

¹² Amir Syarifuddin, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahat serta mengatur keadaan.”¹³

G. Kerangka Teori

Pembangunan desa sebagai upaya dalam proses modernisasi dan memacu laju pembangunan secara menyeluruh dan berencana, menjadi pusat perhatian negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini. Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa.

Dalam praktiknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Tipe kepemimpinan perempuan ada beberapa sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kartono yaitu tipe kepemimpinan kharismatis, paternalistik/maternalistik, militeristik, otokratik, laissez faire, populistik, administratif/eksekutif, demokratik.¹⁴ Dari beberapa tipe kepemimpinan dapat menimbulkan beberapa kendala pembangunan desa, setelah terpenuhinya tipe kepemimpinan dapat meningkatkan pembangunan di desa tersebut.

¹³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h. 45.

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), h. 44.

H. Kajian Terdahulu

1. Angelia M. Manembu

Penelitian berjudul “*Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa)*”. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pembangunan desa sedikit menyimpang dari tradisi perempuan Minahasa, yakni peran mereka dalam kepemimpinan Desa di Maumbi terlihat kurang, seperti kurangnya perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada di desa, kurang dalam jabatan di aparat desa. Ini menjadi menarik untuk dikaji karena perubahan masyarakat telah menganulir peran perempuan tersebut, sehingga perlu dicari akar permasalahannya.¹⁵ Persamaan penelitian ini pada penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pembangunan masyarakat desa, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Angelia M Manembu lebih difokuskan pada peranan.

2. Mirza Adia Nova

Penelitian berjudul “*Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa (Studi Femenisme dan Gender pada Perempuan Gampong Blang Krueng Kabupaten Aceh Besar)*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perempuan sebagai warga Negara dan insan pembangunan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap kegiatan pembangunan di segala bidang. Desa Blang Krueng Kabupaten

¹⁵ Angelia M. Manembu, Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa), *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 7, No 1, 2018.

Aceh Besar menjadi objek penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui lebih jauh peran perempuan dalam pembangunan desa. Partisipasi aktif perempuan menjadi kunci atas keberhasilan desa Blang Krueng yang selama ini banyak menerima penghargaan baik provinsi maupun nasional.¹⁶ Persamaan penelitian ini pada penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pembangunan masyarakat desa, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Mirza Adia Nova lebih difokuskan pada peranan.

3. Handrianus Vianey Melin

Penelitian berjudul “*Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan peran dan hambatan perempuan dalam kontribusinya pada pembangunan desa di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa peran perempuan dalam pembangunan desa di Desa Subun Bestobe adalah peran dalam kelompok keswadayaan dan ukuran partisipasi perempuan terdapat pada berbagai bidang yakni; bidang politik, adat, pemerintahan, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan. Simpulan penelitian ini adalah keterlibatan dan tingkat partisipasi perempuan dalam membangun desa sudah baik, namun dari sisi kuantitas yang menjadi aparatur desa sangat minim. Pada pembangunan desa, berbagai pihak yang terlibat dapat menyeimbangkan distribusi

¹⁶ Mirza Adia Nova, “Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa (Studi Femenisme dan Gender pada Perempuan Gampong Blang Krueng Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 1, No 1, 2016.

kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi gender tertentu.¹⁷ Persamaan penelitian ini pada penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pembangunan masyarakat desa, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Handrianus Vianey Melin lebih difokuskan pada peranan.

4. Huna Djumati

Penelitian berjudul “*Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara*”. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kao Utara cukup baik dan signifikan. Partisipasi yang mendukung pembangunan itu dapat dilihat dalam kualitas capaian indikator, yakni: Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam hal kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership), ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa di kecamatan Kao Utara.¹⁸ Persamaan penelitian ini pada penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pembangunan masyarakat desa, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Huna Djumati lebih difokuskan pada peranan.

¹⁷ Handrianus Vianey Melin, “Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa, *Jurnal Riset Sosial Humaniora*”, Vol 5, No , 2015.

¹⁸ Huna Djumati, “Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 1, 2016.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mencakup tentang teori pemerintah desa, pembangunan masyarakat, perempuan, kepemimpinan perempuan, dan peran perempuan.

BAB III METODE PENELITIAN, yang meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa perspektif fikih siyasah.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.⁶²

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, penetapan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁶³

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

⁶² Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.

⁶³ John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 167.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.⁶⁴ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari beberapa pihak yaitu:

- 1) Geuchik
- 2) Ketua PKK
- 3) Masyarakat

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.⁶⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.⁶⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung

⁶⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

⁶⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 197.

terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung⁶⁷. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap geuchik, ketua PKK, dan masyarakat pada Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Paya Bujok Seuleumak dan Gampong Geudubang Jawa.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁸

1. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 88.

⁶⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 56.

2. Menentukan kategori

Langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

4. Membuat ekplanasi alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

5. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

E. Pengujian Keabsahan Data

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam

memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.⁶⁹

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.
2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
3. Triangulasi teori, makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu

⁶⁹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 4 Gampong di Kecamatan Langsa Baro yang meliputi Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Paya Bujok Seuleumak, dan Gampong Geudubang Jawa.

Gampong Lengkong adalah salah satu Gampong di Kecamatan Langsa Baro yang mempunyai luas wilayah 29,00 Ha. Jumlah penduduk Gampong Lengkong sebanyak 2.585 Jiwa yang terdiri dari 1.302 laki-laki dan 1.283 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 697 KK. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro secara umum berupa Gambut dan sedikit Perbukitan yang berada pada ketinggian antara 23 M s/d 57 M di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 29 s/d 30 Derjat Celcius. Gampong Lengkong terdiri dari 5 (lima) Dusun, Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 0.02 km² dengan waktu tempuh 5 menit, dari ibukota 5 km² dengan waktu tempuh 15 menit dan Ibukota Provinsi 435 km² dengan waktu tempuh 9 jam.

Gampong Paya Bujok Tunong adalah salah satu Gampong di Kecamatan Langsa Baro yang mempunyai luas wilayah 32,00 Ha. Jumlah penduduk Gampong Paya Bujok Tunong sebanyak 3.212 Jiwa yang terdiri dari 1.416 laki-laki dan 1.796 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 712 KK.

Sistem pemerintahan Gampong Paya Bujok Seuleumak berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu : asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum. Pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah gampong dipimpin oleh seorang geuchik dan dibantu oleh kepala dusun, imum chik dan imum dusun yang memiliki peranan cukup kuat dalam tatanan pemerintah gampong.

Nama Gampong Geudubang Jawa terdiri atas dua suku kata yaitu, menurut keterangan narasumber dan pelaku sejarah yang memang asli penduduk Gampong Geudubang Jawa, bahwa kata “Geudubang” bermakna sejenis ikan, dan kata “Jawa” bermakna suku jawa. Gampong Geudubang Jawa pada awalnya merupakan areal hutan, jauh sebelum kemerdekaan RI atau pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942. Areal hutang mulai digarap oleh beberapa kepala keluarga berstatus karyawan PPN. Setahun kemudian akhirnya areal yang tadinya hutan belukar berubah menjadi perkampungan dan perladangan. Awal kata Geudubang Jawa diambil dari nama sejenis ikan yang cukup banyak terdapat di dalam sungai yang mengelilingi perkampungan, dan kata Jawa adalah menunjukkan suku bangsa yang mula-mula menetap pada masa itu di Gampong tersebut.

B. Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Pembicaraan mengenai kepemimpinan berawal dari adanya suatu kenyataan bahwa seseorang lebih menonjol dibanding orang lain, seseorang lebih efektif dalam memimpin dibanding yang lain. Demikian pula terdapat

fenomena bahwa seorang pemimpin yang telah sukses memimpin di tempat lain ternyata tidak begitu sukses memimpin di tempat dan situasi yang berbeda. Kemudian muncul suatu kesadaran bahwa situasi kepemimpinan adalah interaksi positif antara sang pemimpin dengan bawahan yang dipimpin.

Pada gampong di Kecamatan Langsa Baro, seluruh geuchik adalah laki-laki, tidak ada seorangpun perempuan yang menjadi geuchik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak orang menganggap kepemimpinan laki-laki lebih baik daripada perempuan. Dengan demikian perempuan hanya memimpin sebagai ketua PKK di gampong termasuk di Gampong Lengkong, Paya Bujok Tunong, Paya Bujok Seuleumak dan Geudubang Jawa.

Peran kepemimpinan perempuan dalam pembangunan masyarakat gampong masih belum optimal. Pada Gampong Lengkong, ketua PKK hanya lebih mengutamakan kegiatan gotong royong dan belum ada tindakan lainnya yang berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Ratna Dewi mengatakan:

“Saya sebagai ketua PKK fokus pada kegiatan gotong royong supaya budaya gotong royong kita tidak pudar. Itu pun kita lakukan 1 bulan sekali”.⁷⁰

Hal yang sama disampaikan Ibu Nurti yang mengatakan:

“Kalau kegiatan PKK fokusnya ke pengalaman pancasila, gotong royong, kesehatan serta pengembangan kegiatan koperasi. Kalau yang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ratna Dewi (Ketua PKK Gampong Lengkong) pada tanggal 15 Mei 2023.

berkaitan dengan keterampilan sih sampai saat ini belum kita aplikasikan”.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan perempuan hanya terbatas menjadi ketua PKK, dan kegiatannya pun hanya mengacu pada kegiatan gotong royong dan kegiatan koperasi. Padahal kegiatan PKK harus lebih banyak menggali potensi yang ada untuk pembangunan masyarakat desa misalnya untuk pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Keterlibatan perempuan di Kecamatan Langsa Baro relatif masih sedikit. Buktinya saja tidak ada perempuan yang menjadi geuchik, kepada dusun. Namun beberapa perempuan bekerja hanya mengisi posisi di kantor pemerintahan desa seperti menjadi administrator, dan lain sebagainya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurdiah mengatakan:

“Kepemimpinan kami sebagai perempuan hanya sebatas pada sosialisasi kegiatan tertentu saja seperti pengajian, membuka kelas ibu hamil, dan lain-lain. Lagi pula belum ada perempuan yang menjadi geuchik di gampong kami. Pasti semua kegiatan yang kami jalankan sudah terkoordinasi dengan bapak Geuchik”.⁷²

Hasil wawancara lainnya dengan Ibu Marsitah mengatakan:

“Kalau di kampung ini ada beberapa kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat desa seperti pengajian, sosialisasi kewirausahaan, koperasi, dan kegiatan gotong royong. Kalau yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik kami tidak mempunyai wewenang. Paling nanti saya meminta masyarakat perempuan lainnya untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi dalam pembangunan desa”.⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nurti (Ketua PKK Gampong Paya Bujok Tunong) pada tanggal 15 Mei 2023.

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Nurdiah (Ketua PKK Gampong Paya Bujok Seuleumak) pada tanggal 15 Mei 2023.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Marsitah (Ketua PKK Gampong Geudubang Jawa) pada tanggal 15 Mei 2023.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan perempuan di Kecamatan Langsa Baro terbatas dengan jabatan yang diemban, karena belum ada perempuan yang menjadi geuchik, namun upaya pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro dilakukan melalui ketua PKK.

Hasil wawancara lainnya disampaikan oleh Ibu Ngatina sebagai masyarakat desa mengatakan:

“Kepemimpinan perempuan dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak, lagipula perempuan juga hanya bekerja di kantor desa. Dalam penyampaian aspirasi untuk pembangunan pun partisipasi perempuan hanya sedikit”.⁷⁴

C. Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Perspektif Fikih Siyasah

Salah satu indikator pembangunan masyarakat desa adalah tingkat kemiskinan, yaitu masyarakat memiliki daya ekonomi secara individu untuk membeli dan memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar mereka secara terbuka atau umum. Pada gampong yang menjadi objek penelitian, tingkat jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin

Nama Gampong	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	
	2020	2021
Lengkong	101	98
Paya Bujok Tunong	96	109
Paya Bujok Seuleumak	132	146
Geudubang Jawa	54	50

Sumber: Kecamatan Langsa Baro dalam Angka

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ngatina (Masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong) pada tanggal 15 Mei 2023.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa gampong Paya Bujok Seuleumak merupakan gampong dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yang mencapai 146 orang pada tahun 2021, sedangkan gampong dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit dari tabel di atas yaitu gampong Geudubang Jawa yaitu 50 orang. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk miskin maka dapat dijelaskan bahwa gamong Paya Bujok Tunong dan Paya Bujok Seuleumak mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Paya Bujok Tunong mengatakan:

“Memang benar ada peningkatan jumlah penduduk miskin. Kalau mengenai pembangunan masyarakat kami sudah berupaya memberikan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah gampong. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya dengan menggunakan uang bantuan tersebut untuk membuka usaha kecil-kecilan”.⁷⁵

Selain itu hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak mengatakan:

“Meningkatnya masyarakat miskin di gampong kami memang tidak terlepas dari banyaknya pengangguran, apalagi jumlah penduduk Gampong Paya Bujok Tunong cukup padat. Tapi kami terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di antaranya dengan memberikan bantuan menggunakan dana gampong agar masyarakat dapat menggunakan uang tersebut untuk berwirausaha. Lain halnya dengan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Effendy Usman Ben (Geuchik Gampong Paya Bujok Tunong) pada tanggal 15 Mei 2023.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syarifuddin (Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak) pada tanggal 15 Mei 2023.

Gampong Lengkong dan Geudubang Jawa yang jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan pada tahun 2021. Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Lengkong mengatakan:

“Alhamdulillah jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan. Ini tidak terlepas dari dukungan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat berwirausaha supaya pendapatan mereka meningkat”⁷⁷

Hal yang sama diutarakan oleh Geuchik Gampong Geudubang Jawa yang mengatakan:

“Kami di sini segenap perangkat desa berpartisipasi untuk mensosialisasikan kewirausahaan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, kami juga memberikan bantuan dana bagi masyarakat miskin agar ekonominya cukup”.⁷⁸

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat, pemerintahan desa memberikan sosialisasi kewirausahaan. Selain itu, pembangunan masyarakat dalam aspek lainnya seperti perencanaan pembangunan dalam aspek nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik masyarakat, yaitu terciptanya suasana kegotongroyongan sosial dalam proses pembangunan masyarakat dapat terpenuhi. Pada Gampong Lengkong, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Paya Bujok Seuleumak dan Gampong Geudubang Jawa dilaksanakan dengan baik seperti misalnya berpartisipasi pada pemilihan kepala desa, kepala daerah, dan masyarakat gampong tidak terkecuali perempuan juga menjadi tim sukses pada kontestasi pemilihan kepada daerah. Dalam hal gotong royong, masyarakat

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri (Geuchik Gampong Lengkong) pada tanggal 15 Mei 2023.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syafrial Anwar (Geuchik Gampong Geudubang Jawa) pada tanggal 15 Mei 2023.

juga berpartisipasi dalam gotong kebersihan gampong dan gotong royong pada acara tertentu yang dilaksanakan pemerintah gampong.

Yusuf al-Qardhawi menyejajarkan kedudukan wanita dengan laki-laki dalam peranannya duduk di pemerintahan menurut *fikih siyasah*, sepenuhnya memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan secara Islam untuk kemaslahatan umat. Ia beralasan bahwa wanita dewasa adalah manusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadat kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan-Nya, berdakwah untuk agamanya, dan berkewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahyi munkar seperti halnya kaum pria.⁷⁹

D. Analisis Penulis

Peran perempuan dalam pemerintahan serta pembangunan desa menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya laki-laki saja yang mempunyai peran dalam pemerintahan serta pembangunan desa, namun perempuan juga. Kesetaraan yang berkadilang gender adalah kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku yang saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengisi di berbagai sektor.

Perempuan saat ini memiliki beragam profesi di dalam masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam keluarga, perkantoran, politik maupun kepala daerah. Dalam fikih siyasah, peran perempuan cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya

⁷⁹ Yusuf al-Qardhawy. *Siyasah al-Syar'iyah. Maktabah Wahbah*, Cairo Mesir, 1419 H/ 1998.M, h. 33.

dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam. Diantara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat karena semua manusia di muka bumi itu sama yaitu untuk beribadah.

Menurut penulis, kedudukan pemimpin perempuan dalam Islam sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Ada yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, sebaliknya ada juga yang tidak membolehkan. Keterlibatan perempuan di Kecamatan Langsa Baro relatif masih sedikit. Buktinya saja tidak ada perempuan yang menjadi geuchik, kepada dusun. Namun beberapa perempuan bekerja hanya mengisi posisi di kantor pemerintahan desa seperti menjadi administrator, dan lain sebagainya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepemimpinan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan perempuan di Kecamatan Langsa Baro terbatas dengan jabatan yang diemban, karena belum ada perempuan yang menjadi geuchik, namun upaya pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro dilakukan melalui ketua PKK.
2. Pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Langsa Baro dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di antaranya dengan memberikan bantuan menggunakan dana gampong agar masyarakat dapat menggunakan uang tersebut untuk berwirausaha. Selain itu dalam meningkatkan pembangunan masyarakat, pemerintahan desa memberikan sosialisasi kewirausahaan. Pembangunan masyarakat dalam aspek lainnya seperti perencanaan pembangunan dalam aspek nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik masyarakat, yaitu terciptanya suasana kegotongroyongan sosial dalam proses pembangunan masyarakat dapat terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Perempuan yang mengemban suatu jabatan di desa seperti menjadi ketua PKK harus menggali potensi lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat desa misalnya dengan memberikan seminar pendidikan, kesehatan, sosialisasi kewirausahaan, dan tentunya perlu koordinasi yang intensif dengan kepala desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini seperti menambah jumlah desa yang akan diobservasi.